Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 178-192
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10082811)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10082811>

Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974

Febry Yuda Fitianto^{1*}, Aris Nurullah²

¹Universitas Sunan Giri Surabaya, Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256

*Email korespondensi: Febryyuda6@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Permohonan Dispensasi Kawin adalah salah satu bukti bahwa bila seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan akan tetapi belum cukup umur yaitu dengan persyaratan batas usia 19 tahun bagi wanita dan usia 19 tahun bagi laki-laki akan tetapi apabila umur kedua calon mempelai di bawah umur yang telah di atur oleh undang-undang maka wajib melaksanakan permohonan dispensasi kawin. Perubahan terhadap Undang-Undang no 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang no 16 tahun 2019 diperlukan analisis secara yuridis atau analisis hukum karena apakah secara efektif dapat berperan dalam menekan angka perkawinan dini atau permohonan pengajuan dispensasi kawin di pengadilan Agama Surabaya dengan mencari informasi mengenai pertimbangan hakim apa saja faktor yang dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Surabaya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penulis mengharapkan informasi dari Narasumber agar bagaimana Undang-Undang No 16 tahun 2019 dapat berperan secara efektif di Masyarakat akan tetapi Pengadilan Agama harus bekerja sama dengan stakeholder seperti Dinas Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Dinas perlindungan perempuan dan anak dan Dinas sosial terkait di Kota Surabaya. Teknik Wawancara, Teknik Observasi dan Teknik Dokumentasi yang dijadikan acuan Tata cara bagi penulis dalam melaksanakan karya ilmiah skripsi. menggunakan analisis data sebagai rangkuman kesimpulan dari data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian kualitatif di pengadilan agama Surabaya. Secara garis besar efektifitas pemberlakuan Undang-Undang no 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya berjalan dengan baik walaupun sempat ada kenaikan di tahun 2020 akan tetapi sampai saat ini terus menurun dan stabil.

Kata Kunci: *Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Dispensasi Kawin*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 04 November 2023

PENDAHULUAN

Sebuah pernikahan tidak harus di konteks kan dalam materi harta saja akan tetapi di bahtera pernikahan di haruskan mempunyai pondasi yang kuat dalam memahami ilmu agama sehingga apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran maupun masalah lainnya akan dapat mendapatkan solusi yang tepat dalam menyelesaikannya. Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia perkawinan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal kehidupan seseorang tanpa perkawinan akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya sebab Allah Subhanahu Wa ta'ala telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan dan Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya manusia yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau. Perkawinan sebagai ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah diatur dalam hukum islam dan undang-undang

karena dari perkawinan tersebut seseorang bisa menjaga harga dirinya serta menjauhkan dari fitnah dan dengan perkawinan pula seseorang telah melaksanakan separuh agamanya karena dalam perkawinan terdapat banyak pahala yang didapatkan dimana tidak dapat diperoleh ketika membujang atau hidup sendiri untuk itulah sangat dianjurkan bagi seseorang yang sudah mampu untuk menyejajarkan menikah. Dasar hukum pernikahan ada di dalam surah Al-Nisa Ayat ke 3

مَا أَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَاَنْ خِفْتُمْ فَاَنْ رُبْعَ وَتَلْتِ مَثْنَى النِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَانَكِحُوا الْيَتِيمَى فِي تَفْسِطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ تَعُولُوا إِلَّا أَدْنَى ذَلِكَ ۖ إِيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (2009)

Hukum menikah adalah mubah jika seseorang sibuk beribadah dan mencari ilmu maka kesibukan itu lebih utama baginya daripada menikah argument shafi’i adalah Surah Ali-Imran ayat ke 39 dan 14 serta al-nisa ayat ke 3:

فَإِنَّمَا الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ
Artinya : kemudia malaikat (Jibril) memanggil Zakariya sedang ia tengah berdiri melakukan shalat magrib di mihrab (katanya): “sesungguhnya allah mengembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya yang membenarkan kalimat(yang datang) dari allah menjadi ikutan menahan diri(dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. (39) (2009)

وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتِيمَى فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَتَلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعُولُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ إِيْمَانُكُمْ ۖ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

Artinya : “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu : wanita-wanita anak-anak harta yang banyak dari jenis emas, perak ,kudapilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia,dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (agama, 2009)

Cukup menarik ketika membicarakan masalah pernikahan di bawah umur atau yang biasa disebut sebagai istilah perkawinan dini hal ini karena di dalam kitab fiqh klasik praktek perkawinan tersebut dibenarkan dan diperbolehkan imam Al-Syafi’i misalnya di dalam kitab al-umm dengan tegas mengkategorikan praktek perkawinan itu pada tiga bagian jika dilihat dari umur pengantin wanita yakni pernikahan janda, pernikahan gadis dewasa. Dan pernikahan anak-anak dan mengenai pernikahan anak-anak (*al-shaghirah*) Imam Al-syafi’i mewajibkan fungsi wali secara total artinya wali memiliki hak penuh untuk memilih dan menentukan pernikahan dari anaknya tersebut tanpa harus mendapatkan jawaban dari si anak (hak *ijbar*) akan tetapi standarnya adalah tidak adanya kerugian bagi si anak hak *ijbar* dalam pernikahan tersebut disandarkan pada sebuah hadist Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang pernikahannya dengan Aisyah ra yang langsung dilakukan oleh Abu Bakar ra sebagai ayahnya tanpa sepengetahuan dari Aisyah ra :

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : نَزَّوْحَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوَعَدْتُ فْتَمْرَقَ شَعْرِي فَوْقَى جُمَيْمَةَ فَاتْتَنِي أُمِّي أَمْ رُوْمَانٌ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِي صَوَاجِبٌ لِي فَصَرَحَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لِأَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيْدِي حَيْ أَوْفَقْتَنِي عَلَىٰ بَابِ الدَّرِّ وَإِنِّي لِأَتَهْجُ حَتَّىٰ سَكَنْ بَعْضُ نَفْسٍ ثُمَّ أَخَذَتْ سَنَا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدَخَلْتَنِي الدَّارَ فَإِذْ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَىٰ خَيْرِنَ وَالْبِرْكَةِ وَعَلَىٰ خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَانِي قَلَمَ يَزُّ عَنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَىٰ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ {رواه البخاري}

Artinya : dari Hisyam bin urwah dari aisyah ra berkata nabi menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun kami berangkat ke Madinah dan tinggal di tempat bani haris bin khazraj kemudian aku terserang penyakit demam panas dan membuat rambutku banyak yang rontok

kemudian ibuku ummu ruman datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku dia memanggilku dan aku memenuhi panggilannya sementara aku belum tahu apa kehendaknya dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar setelah perasaanku agak tenang ibuku mengambil sedikit air lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu ternyata di dalam rumah itu sudah munggu beberapa orang Wanita anshar mereka menyambutku dan berkata : selamat semoga engkau mendapat berkah dan keberuntungan besar lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka mereka lantas merapikan dan mendandani diriku tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan rasullah SAW ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau sedangkan aku Ketika itu baru berusia Sembilan tahun (HR BUKHARI). ((Imam al-Bukhari)

Mengenai hadist di atas terdapat dua pemikiran *mu'tabar* yang saling bertentangan yakni mereka yang menerima seperti pemahaman jumbuh ulama dan mereka menolak yang menolak seperti Ibnu Syubrumah Asghar Hasbi dan lain-lain bagi mereka yang menerima dasar utamanya adalah kemutlakan hadist yang disampaikan oleh imam Al-bukhari untuk diterima karena kitabnya adalah karya yang paling baik dari kitab-kitab hadist lainnya dan standar penyelesaiannya sangatlah *tasyaddud* karena pencariannya tidak hanya dari apa yang ia dengar akan tetapi langsung menuju sumber-sumber hadist itu dikeluarkan imam Al-nawawi mengenai keutamaan kitab shahih Al-bukhari pernah berkata :

أَوَّلُ مُصَفِّ فِي الصَّحِيحِ الْمُحَرَّرِ، صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ مُسْلِمٍ، وَهُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ الْقُرْآنِ، وَالْبُخَارِيُّ أَصَحُّهُمَا وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدٌ، وَقِيلَ مُسْلِمٌ أَصَحُّ، وَصَوَّابُ اللَّأُولِ

Artinya : "kitab pertama yang paling shahih adalah shahih al-bukhari kemudian shahih muslim keduanya adalah kitab paling shahih setelah al-quran dan shahih al-bukhari paling shahih di antara keduanya dan paling banyak manfaatnya ada yang mengatakan shahih muslim paling shahih akan tetapi yang benar adalah yang pertama". (Al-Nawawi, Al-Taqrīb wa al-taisir ma'rifati sunan al-basyir al-nadzir fi ushul al-Hadits; Al-Nawawi, Al-Taqrīb wa al-taisir ma'rifati sunan al-basyir al-nadzir fi ushul al-Hadits)

Selain itu dari segi konsensus (*ijma*) Imam Al-nawawi pernah menjelaskan di dalam syarh sahih muslimnya bahwa telah terjadi *ijma* kaum muslimin tentang diperbolehkan menikahkan gadis di bawah umur dan jika telah berumur (*baligh*) maka tidak ada *khiyar* untuk *fasakh* baginya menurut imam malik dan imam Syafi'i dan seluruh *fuqaha hijaz* sedang *fuqaha irag* menyatakan ia boleh melakukan *khiyar* jika telah *balighah* dengan demikian maka dapat difahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dibenarkan oleh syara'a sesuai dengan *sharih* teks hadist di atas bahkan demi menjaga keyakinan terhadap kebolehan menikah dengan wanita di bawah umur di *Bangladesh* muncul ulama yang bernama Fazhulu Haque Amini yang mengancam melakukan jihad apabila pemerintah melarang pernikahan di bawah umur dia mengatakan memiliki pasukan 200.000 orang jihad yang siap mengorbankan diri untuk melawan hal ini alasannya melakukan tindakan tersebut adalah karena larangan pernikahan di bawah umur merupakan anti al-quran dan merupakan tantangan terhadap pernikahan nabi yang mengambil pengantin di bawah umur dan akan menempatkan karakter moral nabi menjadi kontroversi dan larangan. (Al-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-hajjaj)

Adapun yang menolak pernikahan di bawah umur adalah seperti ungkapan Ibn Syubrumah yang menganggap pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah ra adalah sifat khusus yang dimiliki oleh Nabi dan tidak bisa begitu saja diikuti oleh umatnya ungkapan tersebut dikutip oleh Ibnu Hazim di dalam kitab al-muhalla :

قَالَ ابْنُ شُرَيْمَةَ: لَا يَجُوزُ إِنْكَاحُ أَبِي ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ إِلَّا حَيًّا تَبْلُغَ وَتَأَدَّنَ. وَرَأَى أَمْرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خُصُوصًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، كَالْمَوْهَبَةِ، وَيَكَاحُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ

Artinya : *ibnu syubranah berkata seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia baligh dan dimintai persetujuannya ibdu syubrrumah memandang masalah pernikahan aisyah ra sebagai khususiyah bagi nabi seperti kebolehan menikah Wanita tanpa mahar juga kebolehan menikahi lebih dari empat orang istri. (Hazm)*

Ungkapan diatas memiliki hubungan (*munasabah*) dengan hadist lain yang menyebutkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah ra semata-mata karena petunjuk Allah swt yang didatangkan melalui wasilah malaikat Jibril as :

عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : جاء بي جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرقه حرير فقال : هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya : *dari ibn malikah dari asiyah berkata : Jibril as datang menemui rasullah saw untuk menjelaskan mengenai aku melalui sepotong sutra seraya berkata : inilah istrimu di dunia dan akhirat (HR Ibn Hibban). (Hibban)*

Melalui penjelasan hadist inilah kemudia muncul konklusi bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah atas kehendaknya akan tetapi semata-mata karena perintah Allah SWT dan karena sifatnya adalah perintah maka sebagai seorang utusan nya harus melaksanakan perintah tersebut meskipun belakangan akan terasa asing di hadapan masyarakat untuk itu penekanan kekhususan Nabi Muhammad SAW di atas harus dikedepankan agar tidak begitu saja menjadi legitimasi baru dalam melakukan praktek nikah dibawah umur. (Husein Al-Zahabi)

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut UUP adalah berkaitan dengan usia perkawinan yaitu calon mempelai pria hanya diizinkan untuk melangsungkan perkawinan selama telah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai 19 tahun.

Di Indonesia ketentuan syarat usia Perkawinan dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahirnya Undang-Undang Perkawinan ini dapat pula disebut sebagai capaian keberhasilan Pemerintah dalam usahanya melembagakan praktik perkawinan di Indonesia yang bersesuaian dengan kebutuhan mayoritas masyarakat yang beragama Islam. (Fuad, 2016)

Ketentuan syarat usia perkawinan diatur dalam dalam Pasal 7 ayat 1 dan Ayat 2 Dalam Pasal tersebut secara jelas dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun apabila terjadi penyimpangan terhadap aturan pasal ini maka dapat mengajukan dispensasi pada pengadilan. (e note Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bunyi secara lengkap aturan syarat usia perkawinan sebagaimana termuat dalam Bab II tentang Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

- (1)Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun
- (2)Dalam hal penyimpangan dalam Ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Senada dengan rumusan Undang-Undang perkawinan Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan adanya usia perkawinan bagi pria dan wanita sebagaimana dinyatakan dalam Bab IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Perkawinan Bagian Kedua Tentang Calon Mempelai Pasal 15 (1) dan (2) sebagaimana berikut:

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan pada Kedua aturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan inilah, diketahui bahwa dalam Hukum perkawinan di Indonesia ditetapkan adanya batasan usia sebagai salah satu syarat melangsungkan pernikahan. Ketentuan batasan usia ini berlaku sama baik bagi pria maupun wanita. Hal yang berbeda adalah pada penetapan usia perkawinan itu sendiri, jika bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 Tahun. Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan dan anggapan adanya perbedaan perkembangan secara biologis antara pria dan wanita, dimana wanita dianggap lebih cepat perkembangan biologis antara pria dan wanita, dimana wanita dianggap lebih cepat perkembangan biologisnya dibanding dengan pria. Berkenaan dengan semakin kuatnya dorongan persamaan kedudukan di depan hukum dan perkembangan pendidikan wanita, perbedaan penetapan usia perkawinan antara pria dan wanita tersebut menjadi perdebatan baru. (Nugraha, 2019)

Dalam konteks hukum, upaya uji materiil di Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (1) UUP khususnya pada frasa usia (enam belas tahun telah dilakukan pada tahun 2014 salah satu petitem yang dimohonkan oleh para pemohon adalah perubahan frasa dari yang semula usia 16 telah menjadi 18 namun Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 bertanggal 18 juni 2015 menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya dengan alasan bahwa pengaturan usai perkawinan masuk dalam ranah *open legal policy* pembentuk Undang-Undang (Konstitusi, Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, 2015)

Upaya uji materiil terhadap pasal yang sama dilakukan kembali pada tahun 2017 salah satu petitem yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah perubahan frasa umur 16 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menjadi umur 19 tahun sebab dianggap bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kesamaan Kedudukan Di Depan Hukum (1945)

Para pemohon menganggap bahwa ketentuan perbedaan syarat usia perkawinan wanita dan pria merupakan tindakan diskriminatif secara nyata yang dilakukan oleh penyusun Undang-Undang dan bertentangan dengan prinsip *equality before law* sebagaimana terdapat dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga pasal 7 ayat 1 UUP harus dianggap sebagai produk inkonstitusional (Konstitusi, salinan putusan mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 2019)

Atas permohonan uji materiil ini Majelis Hakim Konstitusi dalam amar putusannya sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV 2017 bertanggal 5 april 2019 mengabulkan sebgaiian permohonan pemohon khususnya berkenaan frasa usia 16 tahun yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Hakim Konstitusi juga memerintahkan pada pembuat Undang-Undang dalam jangka waktu maksimum 3 tahun untuk melakukan perubahan terkait batas usia minimal perkawinan bagi perempuan berkaitan dengan perintah Hakim Mahkamah Konstitusi ini Pemerintah bersama dengan DPR-RI telah bersepakat melakukan perubahan terbatas Undang-Undang perkawinan khususnya berkenaan dengan usia perkawinan bagi wanita dan telah ditetapkan pada hari senin 16 september 2019 sejak adanya perubahan

terbatas Undang-Undang perkawinan ini syarat usia minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. (Law)

METODE

Metode penelitian yang saya gunakan adalah dengan penelitian secara kualitatif karena sebagai metode yang baru dan beda bila dibandingkan dengan metode kuantitatif karena penelitian kualitatif ini dari segi aspek popularitasnya belum lama dan masih dikatakan baru dengan kata lain metode kualitatif dinamakan sebagai *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. (Allen, Harrell. *Policy Science and Future Research*, Praeger Publisher,) Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena datanya kualitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia.

HASIL

Paparan Data

1. Melaksanakan kegiatan wawancara kepada Hakim Dr. H, Hamzahwadi., M.H di Pengadilan Agama Surabaya dengan konteks pertanyaan sesuai dengan judul yaitu analisis yuridis terhadap batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Surabaya.
 - a bagaimana pertimbangan hakim alasan di kabulkannya permohonan dispensasi kawin saat hamil tidak di kabulkan dan tidak hamil akan tetapi di kabulkan?
 - b kenapa kebanyakan permohonan dispensasi kawin itu banyak yang di kabulkan?
 - c apakah seseorang yang telah mengajukan dispensasi kawin dan menikah itu tidak berpengaruh akan meningkatnya pengajuan gugatan cerai atau talak karena pasangan tersebut belum siap menikah dan masih dibawah umur?
 - d bagaimana menurut hakim mengenai efektifitas pemberlakuan Undang-undang no 16 tahun 2019 di pengadilan Agama Surabaya?
2. Melaksanakan kegiatan Wawancara kepada panitera muda gugatan Koes Atmaja Hutama S.H., S.H.I., M.H di pengadilan agama Surabaya dengan konteks pertanyaan sesuai dengan judul yaitu batas usia perkawinan menurut undang-undang no 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang no 1 tahun 1974 di pengadilan agama Surabaya.
 - a pengajuan dispensasi kawin di bawah umur mengalami penurunan Apakah permintaan atau pengingkatan setelah undang-undang no 16 tahun 2019 di sah kan oleh pemerintah
 - b Bagaimana yang dilakukan oleh pengadilan agama Surabaya dalam mengetahui efektif atau tidak mengenai pembatasan usia perkawinan sesuai dengan undang-undang no 16 tahun 2019
 - c Apakah yang terjadi apabila hakim tidak mengabulkan pengajuan perkawinan di bawah umur
 - d Bagaimana dunia internasional seperti negara islam dalam melakukan Upaya pembatasan usia perkawinan
 - e Apakah dalam menerapkan undang – undang pembatasan usia perkawinan menurut undang – undang no 16 tahun 2019 telah bekerja sama dengan pemerinta kota Surabaya dalam menerapkan undang – undang tersebut
1. hasil putusan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Surabaya tahun 2022 dan 2023 :
 - a hamil diterima

- b hamil tidak di terima
- c tidak hamil di tolak

Temuan Data

Temuan data yang di ambil berdasarkan hasil dari pelaksanaan observasi di lokasi Pengadilan Agama Surabaya berikut ada temuan – temuan yang telah berhasil diambil sehingga bisa dijadikan informasi temuan data terkait hasil dari penelitian di Pengadilan Agama Surabaya :

1. Pelaksanaan wawancara kepada narasumber yaitu Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya dengan mengajukan pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber :
 - a Apakah permintaan pengajuan dispensasi kawin di bawah umur mengalami penurunan atau pengingkatan setelah undang-undang no 16 tahun 2019 di sah kan oleh pemerintah :

“Puncak permintaan dispensasi kawin itu terjadi penurunan apabila sebuah aturan mengenai undang – undang no 16 tahun 2019 tentang dispensasi kawin di sosialisasikan ke masyarakat dan banyak dari kalangan masyarakat yang telah mempersiapkan jauh – jauh hari tanggal pernikahan banyak yang gagal karena ada undang – undang yang baru yang mengatur tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan Wanita sehingga banyak kantor urusan agama yang menolak perkawinan kedua calon mempelai karena umur yang tidak sesuai dengan undang – undang no 16 tahun 2019 sehingga banyak dari masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama Surabaya. Dan tingkat permintaan dispensasi kawin di pengadilan agama Surabaya terjadi peningkatan karena adanya undang – undang baru tersebut yaitu no 16 tahun 2019 tentang dispensasi kawin Dalam menekan perkawinan di bawah umur yang terus berkembang dengan adanya undang – undang no 16 tahun 2019 dinilai efektif berperan menurunkan angka perkawinan di bawah umur karena sebuah undang – undang di ciptakan untuk di taati oleh seluruh kalangan masyarakat Karena apabila usia perkawinan tidak diatur oleh aturan undang – undang maka yang terjadi angka perkawinan di bawah umur akan naik namun perlu di ingat bahwa tugas dan porsi untuk menurunkan angka perkawinan di bawah umur itu bukan hanya letak nya di pengadilan agama saja akan tetapi pengadilan agama adalah unsur terakhir untuk masyarakat melakukan permohonan dispensasi kawin Sebetulnya mengenai cara menurunkan perkawinan di bawah umur adalah persoalan kita Bersama antara pengadilan agama dengan beberapa unsur yang lain contoh di Dinas Pemerintah Kota , Dinas Sosial , Dinas Perlindungan Anak dan perempuan serta anggota Keluarga sehingga Ketika orang mengajukan dispensasi kawin itu tidak harus ke pengadilan agama karena ada Lembaga yang memberikan nasehat – nasehat sehingga bila datang ke pengadilan agama berarti status nya sudah final Penurunan angka dispensasi kawin adalah sebagai bentuk keberhasilan pemerintah kota setempat dalam menekan angka perkawinan di bawah umur dengan di bantu undang-undang no 16 tahun 2019 sebagai pembatasan usia perkawinan Setelah perubahan mengenai pembatasan usia perkawinan dari undang-undang no 1 tahun 1974 ke undang-undang no 16 tahun 2019 banyak dari kalangan masyarakat yang datang secara ramai – ramai ingin melakukan pengajuan dispensasi kawin karena masyarakat kaget akan aturan baru tersebut Karena banyak dari sebgaiian daerah di Surabaya yang masyarakatnya belum mengetahui undang-undang tersebut karena banyak dari kalangan masyarakat yang ditolak di KUA karena perkawinan yang belum cukup umur seperti aturan undang-undang no 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan.”
 - b Bagaimana yang dilakukan oleh pengadilan agama Surabaya dalam mengetahui efektif atau tidak mengenai pembatasan usia perkawinan sesuai dengan undang-undang no 16 tahun 2019 :

“Pernah diadakan survey mengenai alasan kenapa ada pihak yang ingin mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama Surabaya biasanya kebanyakan dari pihak tersebut ingin menghindari perzinahan , lepas dari tanggung jawab orang tua dan hamil Untuk permintaan dispensasi kawin di pengadilan agama Surabaya masih tergolong cukup banyak karena aturan tersebut masih baru sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahui. dalam kurun waktu satu bulan pengadilan agama Surabaya biasa mendapatkan laporan permintaan dispensasi kawin sebanyak 10 perkara itu adalah salah satu tanda bahwa permintaan dispensasi kawin di pengadilan agama Surabaya sudah menurun”

- c Apakah yang terjadi apabila hakim tidak mengabulkan pengajuan perkawinan di bawah umur :

“apabila pengajuan dispensasi kawin tidak di kabulkan oleh hakim pasti akan berakibat kepada pasangan yang ini menikah di bawah umur karena yang di takutkan akan timbul permasalahan – permasalahan apabila tidak di kabulkan akan tetapi kebanyakan dari para pihak yang mengajukan dispensasi kawin di kabulkan oleh hakim Tentu akan sangat banyak sekali permasalahan apabila angka perkawinan di bawah umur dinilai cukup tinggi dan belum ada kekuatan hukum yang mengatur mengenai pembatasan usia perkawinan. Tapi apabila undang-undang perkawinan ini tidak di buat oleh suatu negara akan menjadi persoalan dan perkerjaan yang berat bagi negara Indonesia seperti perkawinan di bawah tangan yang semakin banyak karena tidak adanya undang-undang mengenai pembatasan perkawinan di suatu negara karena zaman semakin maju pasti semakin berubah dari pola fikir masyarakat akan menerapkan aturan perkawinan seperti menerapkan adat istiadat mengenai bolehnya melaksanakan perkawinan saat usia di bawah umur, pergaulan remaja yang bebas , factor ekonomi dan banyak faktor lainnya apabila undang-undang pembatasan perkawinan tidak dibuat”

- d Bagaimana dunia internasional seperti negara islam dalam melakukan Upaya pembatasan usia perkawinan :

“Pembatasan usia perkawinan di negara-negara islam dimotori pertama kali oleh turki dengan terbitnya “Ottoman Law Family Right” yang mengatur tentang regulasi perkawinan pada tahun 1917 secara berturut-turut kemudian pada tahun 1919 lebanon menetapkan “The Muslim Family Law Ordinance” yang kemudian diganti dengan ditetapkannya “The Law of Right of the Family of July 1962” negara – Negara islam lainnya semacam Mesir , Iran , Yordania , Yaman , Syiria juga pada akhirnya Menyusun satu regulasi perkawinan bagi warga negara mereka yang beragama Islam Indonesia sebagai Negara berpenduduk Muslim terbesar di Dunia juga Menyusun produk Undang - Undang tentang perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 disusul dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu asas penting yang disusun Undang-Undang perkawinan di dunia Islam adalah asas kematangan dan kedewasaan calon mempelai kematangan yang dimaksud berkaitan dengan kesiapan fisik maupun psikis kedua calon mempelai dalam membentuk rumah tangga yang Sakinah , Mawaddah warahmah sebagaimana cita-cita yang disampaikan oleh al-Qur’an berkenaan dengan asas kematangan ini Dasar adanya penetapan usia minimum perkawinan bagi calon mempelai berkaitan dengan asas kematangan perbedaan dalam hal kematangan fisik dan psikis tergantung dan terpengaruh oleh letak geografis , budaya dan relasi sosial setempat sehingga tidak menjadi satu hal yang mengherankan jika kemudian terjadi perbedaan dalam penentuan standar usia kematangan.”

- e Apakah dalam menerapkan undang – undang pembatasan usia perkawinan menurut undang – undang no 16 tahun 2019 telah bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya dalam menerapkan undang – undang tersebut :

“Semua Lembaga pemerintahan ikut bekerja dalam menekan angka perkawinan di bawah umur seperti tingkat kelurahan, tingkat dinas kota dan dinas perempuan dan anak, dinas Kesehatan dan dinas sosial semua bekerjasama dalam menekan angka perkawinan di bawah umur dan bukan hanya mengandalkan undang-undang no 16 tahun 2019 saja akan tetapi semua pihak ikut bekerja dalam menekan angka perkawinan di bawah umur di kota Surabaya. Seperti contoh orang yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur bila tidak cukup umur akan di tolak di kantor kelurahan dan Kantor urusan agama itu adalah salah satu bukti sinergitas Bersama dalam menekan angka perkawinan di bawah umur Sebagai salah satu Lembaga hukum dalam menarapkan undang-undang mengenai pembatasan dispensasi kawin sebenarnya bukan hanya menjadi tugas pengadilan agama saja akan tetapi menjadi pekerjaan bagi pemerintah kota setempat dalam menekan angka perkawinan di bawah umur melalui sosialisasi ke desa-desa atau melakukan sosialisasi mengenai bahaya melakukan perkawinan di bawah umur bisa berbahaya bagi Kesehatan ibu dan anak serta dapat mempengaruhi dari status keluarga tersebut.”

2. Pelaksanaan wawancara kepada narasumber yaitu hakim pengadilan agama Surabaya dengan mengajukan pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber :
 - a. Bagaimana menurut hakim mengenai efektifitas pemberlakuan Undang-undang no 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya :

“Sudah efektif dan berjalan dengan baik. ada beberapa pertimbangan kemaslahatan yang harus diutamakan untuk kedua belah pihak yang mengajukan dispensasi kawin serta sedikit dari permohonan dispensasi kawin yang di kabulkan oleh mejelis hakim.”
 - b. Kenapa kebanyakan permohonan dispensasi Kawin banyak yang dikabulkan

“Hakim melihat dan menimbang dari segi kemaslahatan walaupun itu bukan dari segi alasan pokok bila semisal ada pemohon dispensasi kawin usia di atas 17 tahun dalam kondisi sedang hamil dan di tolak permohonannya tentu akan mafsadatnya lebih besar yang mengakibatkan keadaan anak yang dilahirkan menjadi negatife dalam keadaan sosial maupun status.”
 - c. Apakah seseorang yang telah mengajukan dispensasi kawin dan menikah itu tidak berpengaruh akan meningkatnya pengajuan gugatan cerai atau talak karena pasangan tersebut belum siap menikah dan masih dibawah umur :

“Supaya mengetahui efektifitas apakah dispensasi kawin dapat berpengaruh akan meningkatnya angka perceraian harus membutuhkan suatu penelitian ilmiah yang mengkajinya sehingga bisa di jadikan rujukan apakah benar salah satu penyebab perceraian itu akibat dahulu pernah melakukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa permohonan dispensasi kawin yang pernah dilakukan oleh kedua calon mempelai memang ada kasus yang seperti itu akan tetapi tetap harus mengutamakan penelitian ilmiah agar mendapatkan data-data yang akurat karena sampai saat ini pengadilan agama Surabaya belum menemukan data terkait apakah pengaruh permohonan dispensasi kawin dapat meningkatkan angka perceraian.”
 - d. Bagaimana pertimbangan Hakim alasan di kabulkannya permohonan dispensasi kawin saat hamil tidak dikabulkan dan tidak hamil dikabulkan :

“Mengenai permohonan dispensasi kawin saat hamil tidak dikabulkan itu sebenarnya harus di lihat dari segi kemaslahatan dan status usia karena sebenarnya pimpinan Mahkamah Agung selalu menyampaikan pesan dan menyarankan kepada hakim terutama yang menangani kasus permohonan dispensasi kawin agar menolak semua permohonan atau permintaan dispensasi kawin agar masyarakat tidak menganggap bahwa permohonan dispensasi kawin selalu di izinkan oleh majelis hakim di pengadilan agama setempat sehingga masyarakat akan taat aturan terhadap batas usia perkawinan menurut undang-undang no 16 tahun 2019 tapi hakim akan menolak permohonan dispensasi

kawin saat sedang hamil apabila usia masih cukup muda seperti usia 16 tahun ke bawah dan untuk usia di atas 17 tahun dalam kondisi hamil mejelis hakim kebanyakan mengizinkan untuk memperoleh izin dispensasi kawin. untuk permasalahan tidak hamil akan tetapi di izinkan oleh majelis hakim itu juga harus dilihat dari segi kemaslahatan karena merujuk dari perintah pimpinan Mahkamah Agung menyarankan untuk semua hakim menolak semua permohonan dispensasi kawin agar masyarakat taat akan aturan dan dapat mencegah dari perkawinan di bawah umur.”

3. hasil putusan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Surabaya tahun 2022 dan tahun 2023 :

a putusan tahun 2023 hamil di tolak permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim.

1) Nomor Putusan 1710/Pdt.P/2023/PA Sby

Kesimpulan :secara kemaslahatan tidak ditemukan suatu keadaan yang mendesak untuk segera menikah antara anak pemohon dengan calon suaminya yang ditemukan adalah rasa khawatir saja. Usia anak pemohon yang tergolong masih sangat muda 15 tahun dan calon suami sudah ber umur 39 tahun dinilai masih dikatakan belum matang secara umur karena umur masih sangat muda dan calon suami yang umurnya sudah 39 tahun dinilai terlampaui usia yang sangat jauh.

Dampak negatif semisal mempengaruhi tumbuh kembang anak , hak Pendidikan dan hak social anak bisa ditimbulkan apabila perkawinan tetap dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hakim menilai akan banyak sekali mafsadat yang ditimbulkan apabila permohonan dispensasi kawin diizinkan oleh hakim sehingga menurut hakim dengan mengambil rujukan dari “kitab sunan ibnu majah” juz 2 hal 874 bahwa “Rasulullah Saw menetapkan untuk janganlah kamu melakukan sesuatu yang merugikan serta membahayakan dan jangan pula kamu sampai dibuat rugi atau di celakai”.

b putusan tahun 2023 hamil di terima permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim.

1) Nomor 1335/Pdt.P/2023/PA Sby

Kesimpulan:

walaupun secara fisik anak para pemohon belum mencapai usia 19 tahun akan tetapi dipersidangan terbukti dari sigi fisiknya telah menunjukkan kedewasaan. Pembatasan usia perkwinan dinilai juga mempunyai nilai mudharat karena dapat mengambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual , emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

2) Nomor 1682/Pdt.P/2023/PA Sby

Kesimpulan: Usia yang tergolong masih muda 18 tahun dengan status kondisi hamil majelis hakim menilai dengan layak untuk dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena apabila usia semisal di bawah 17 tahun tentu majelis hakim akan menolak permohonan dispensasi kawin. Dari segi fisik sudah menunjukkan sisi kedewasaan dan calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dengan usia yang masih muda.

c putusan tahun 2022 dan tahun 2023 tidak hamil di tolak permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim.

1) Nomor 1674/Pdt. P/2023/PA Sby

Kesimpulan:

Alasan yang terjadi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ingin melakukan perkawinan dini dinilai tidak ada alasan yang sangat mendesak dengan tidak ada nya bukti-bukti pendukung yang cukup. Hakim tunggal menilai tidak ditemukannya unsur keadaan yang memaksa atau keadaan yang sangat mendesak.

2) Nomor 0079/Pdt.P/2022/PA Sby

Kesimpulan: Usia yang terlampaui jauh anak pemohon masih berusia 14 tahun dan calon suami sudah berusia 25 tahun ini yang membuat hakim menolak permohonan dispensasi kawin. Akibat perkawinan siri yang dilakukan oleh orang tua pemohon tidak sah dimata

hukum sehingga untuk permohonan pemohon tidak beralasan hukum karena permohonan para pemohon harus ditolak.

PEMBAHASAN

Untuk analisis data akan dilaksanakan melalui tahapan domain sehingga analisis domain dapat memperoleh suatu gambaran umum dan menyeluruh dari objek atau penelitian atau situasi sosial peneliti menetapkan domain tertentu sebagai landasan utama untuk peneliti selanjutnya, kemudian tahapan yang kedua adalah analisis taksonomi yaitu domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan dan rinci untuk mengetahui struktur internalnya dilakukan observasi.

Analisis yuridis mengenai pembatasan usia perkawinan menurut undang-undang no 16 tahun 2019 di pengadilan agama Surabaya

undang-undang hukum mengenai pembatasan usia perkawinan telah di buat oleh mahkamah konstitusi Republik Indonesia melalui beberapa tahapan sehingga di harapkan dapat berperan secara efektif dalam menekan angka perkawinan di bawah umur.

Langkah – Langkah dalam Upaya pembatasan usia perkawinan di bawah umur sebelumnya juga sudah di buat melalui Undang-undangan yaitu Undang-undang no 1 tahun 1974 akan tetapi terdapat perubahan sehingga bisa di jadikan pembatasan usia perkawinan baru. Untuk melihat kapasitas apakah terdapat ke efektifitas undang-undang no 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang no 1 tahun 1974 perlu dilakukan Upaya kontribusi yang meluas melalui beberapa elemen Lembaga Dinas terkait yang ada di Kota Surabaya.

Seperti hal nya tugas Pemerintah Kota lainnya pembatasan usia perkawinan menjadi suatu momok yang mengerikan apabila tidak di tindak lanjuti ataupun dilakukan Upaya progresif dalam menekan angka Perkawinan di bawah umur karena apabila di biarkan begitu liar mengenai Perkawinan dibawah umur tentu akan menjadikan resiko yang cukup signifikan seperti contoh menurut Dinas Kesehatan akan meningkatnya angka Stunting Ibu dan Anak di suatu Daerah akibat perkawinan usia dini dan menurut dinas sosial angka pertumbuhan penduduk menjadi semakin tinggi berakibat angka perekonomian masyarakat miskin di kota Surabaya menjadi naik akibat sumber daya manusia yang kurang efektif.

Bila kita melihat betapa banyaknya resiko yang di timbulkan akibat perkawinan usia dini tentu bisa sangat ironis bila kita melihatnya dari segi laju peran pemerintah kota dan pengadilan agama Surabaya dalam menekan angka perkawinan usia dini belum maksimal oleh karena itu perkawinan usia dini mau bagaimanapun itu harus ada undang-undang yang mengaturnya dan harus ada pihak-pihak terkait yang membatasi perkawinan usia dini agar kedepannya perkawinan usia dini dapat di kontrol dan tidak terlalu tinggi angka kenaikannya di kota Surabaya.

Dengan di terapkan nya undang-undang no 16 tahun 2019 mengenai Batasan usia 19 tahun bagi calon pasangan Wanita sekiranya sudah mampu mengontrol secara baik artinya setiap melakukan suatu Tindakan perlu dilakukan kehati-hatian dan juga pertimbangan maka secara otomatis ini akan berdampak terhadap pencegahan kenaikan angka perceraian dan mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melihat perkawinan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai dampak yang negative tentunya dengan Upaya-upaya yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga melalui usulan – usulan rakyat maka dengan begitu undang-undang perkawinan ini dapat diterima oleh masyarakat dan juga ini akan memberikan dampak yang baik sebagai penunjang untuk bisa menjadi bangsa yang maju lewat pengoptimalisasi keluarga yang berkualitas dengan cara menaikkan dan menyetarakan batas usia perkawinan oleh karena nya pemerintah hanya mentoleransi usia 19 tahun bagi pria dan usia 19 tahun bagi Wanita.

Pertimbangan hakim yang dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan atau di tolak

suatu pertimbangan hukum harus di tinjau dari segi aspek kemaslahatan apabila kedua calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di tolak maupun di kabulkan di pengadilan agama Surabaya. karena sekali lagi harus mepertimbangkan efek jangka Panjang yang akan terjadi apabila hakim menolak permohonan dispensasi kawin berbicara soal pertimbangan majelis hakim yang menangani kasus permohonan dispensasi kawin seperti di pengadilan agama Surabaya apabila usia 16 tahun ke bawah sudah dalam kondisi hamil otomatis kebanyakan dari mejelis hakim menolak permohonan dispensasi kawin akan tetapi apabila usia 17 tahun ke atas sudah hamil majelis hakim kebanyakan mengizinkan untuk memperoleh permohonan dispensasi kawin karena Kembali lagi kepada aspek jangka Panjang yang akan terjadi apabila tidak diizinkan maupun diizinkan permohonan dispensasi kawin.

Faktor ekonomi semisal profesi pekerjaan dinilai dapat berperan dalam pertimbangan hakim untuk mengizinkan permohonan dispensasi kawin karena dengan adanya sumber nafkah dinilai bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang akan dijalani dengan istri nya.

Psikologi sifat kedewasaan juga menjadi salah satu faktor tolak ukur hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena perkawinan membutuhkan sifat kedewasaan agar dalam mengangani permasalahan yang akan terjadi mampu untuk menyelesaikan dengan baik tanpa ada nya konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan perceraian akibat belum matang nya psikologi sifat kedewasaan seseorang.

Agama juga menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki oleh kedua calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin karena agama yang setara dengan calon laki-laki dan calon perempuan yaitu keduanya islam maka hakim bisa mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena agama islam yang dianut oleh kedua calon mempelai yang mengajukan dispensasi kawin.

Terjadi kenaikan atau penurunan setelah pemberlakuan Undang-undang no 16 tahun 2019 terkait permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Surabaya

bila melihat dari segi kenaikan atau penurunan setelah pemberlakuan undang-undang no 16 tahun 2019 terkait permohonan dispensasi kawin di bentuk oleh pemerintah menurut hasil wawancara dengan hakim dan panitera muda di pengadilan agama Surabaya mengatakan dalam kesaksiannya bahwa undang-undang no 16 tahun 2019 terkait permohonan dispensasi kawin di tahun pertama kali diterapkannya undang-undang tersebut sempat terjadi kenaikan yang cukup tinggi yaitu di tahun 2020 total keseluruhan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Surabaya mencapai 406 di tahun 2020 akan tetapi mengalami penurunan yang cukup stabil di tahun berikutnya karena undang-undang tersebut sudah hampir dipahami dan di mengerti oleh masyarakat sehingga segenap masyarakat sudah paham dan sadar akan hukum mengenai undang-undang no 16 tahun 2019 terhadap kebijakan baru untuk penerapan batas usia perkawinan.

masyarakat dinilai belum memahami akan ada nya undang-undang baru no 16 tahun 2019 yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi kawin di tahun pertama di terapkannya undang-undang tersebut sempat dinilai bahwa masyarakat kaget dengan aturan pembatasan usia yang baru dibentuk akan tetapi lama-kelamaan masyarakat paham akan hukum dan megetahui kebijakan tersebut.

Penerapan undang-undang no 16 tahun 2019 di pengadilan agama Surabaya menurut hakim dan panitera muda gugatan dinilai efektif dalam menekan angka kenaikan permohonan dipspensasi kawin di pengadilan agama Surabaya untuk sampai saat ini dari awal januari sampai awal juli ada sekitar 117 yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah sebagai bukti data bahwa undang-undang no 16 tahun 2019 dapat berperan

secara efektif dalam menekan angka permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Surabaya.

Kesimpulan putusan majelis hakim terhadap permohonan dispensasi kawin di tahun 2022 dan 2023 atas putusan hamil ditolak dan tidak hamil di terima.

Hakim tentu melihat dari pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pemohon dengan memeriksa jenis perkara dan melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum agar dapat memberikan putusan terkait hasil dari persidangan yang dilakukan untuk permohonan dispensasi kawin.

Melihat dari sub bab di atas bahwa pertimbangan hakim dengan jelas dapat mempengaruhi apakah permohonan dispensasi kawin dapat diizinkan atau tidak.

Apabila ada putusan yang ditolak seperti putusan saat kondisi hamil akan tetapi di tolak oleh hakim tunggal pasti ada penyebab nya seperti halnya di dalam putusan Nomor 1710/Pdt.P/2023/PA Sby dengan jelas umur calon suami dari calon mempelai Wanita yang cukup tua dengan umur 39 tahun dan calon Wanita berumur 15 tahun ini merupakan contoh penolakan dari majelis hakim yang adil karena hakim memperhatikan dari segi kemaslahatan jangka Panjang apabila permohonan dispensasi kawin ini diizinkan oleh hakim tentu akan berakibat jangka Panjang yang akan terjadi kepada kedua belah pihak.

Dan apabila ada putusan tidak hamil akan tetapi di terima putusan tersebut oleh hakim tunggal pasti berkaitan dengan kebijakan hakim sehingga bisa mengabulkan permohonan tersebut tentu pertimbangan hakim bisa menjadi persoalan yang penting di dalam putusan ini akan tetapi Kembali lagi kepada kedua calon mempelai pria dan wanita apakah dapat berperilaku secara baik dalam berkeluarga karena permohonan dispenasi kawin diizinkan oleh hakim akan berpengaruh kepada proses pembentukan keluarga usia perkawinan dini yang di bentuk dari permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil Penulisan maka penulis memiliki beberapa kesimpulan dalam Penulisan ini. Adapun kesimpulan tersebut yakni: efektivitas batas usia kawin setelah pemberlakuan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya Sudah efektif dan berjalan dengan baik. ada beberapa pertimbangan kemaslahatan yang harus diutamakan untuk kedua belah pihak yang mengajukan dispensasi kawin serta sedikit dari permohonan dispensasi kawin yang di kabulkan oleh majelis hakim. pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya yakni, Mengenai permohonan dispensasi kawin saat hamil tidak dikabulkan itu sebenarnya harus di lihat dari segi kemaslahatan dan status usia karena sebenarnya pimpinan Mahkamah Agung selalu menyampaikan pesan dan menyarankan kepada hakim terutama yang menangani kasus permohonan dispensasi kawin agar menolak semua permohonan atau permintaan dispensasi kawin agar masyarakat tidak menganggap bahwa permohonan dispensasi kawin selalu di izinkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama setempat sehingga masyarakat akan taat aturan terhadap batas usia perkawinan menurut undang-undang no 16 tahun 2019 tapi hakim akan menolak permohonan dispensasi kawin saat sedang hamil apabila usia masih cukup muda seperti usia 16 tahun ke bawah dan untuk usia di atas 17 tahun dalam kondisi hamil mejelis hakim kebanyakan mengizinkan untuk memperoleh izin dispensasi kawin. untuk permasalahan tidak hamil akan tetapi di izinkan oleh majelis hakim itu juga harus dilihat dari segi kemaslahatan karena merujuk dari perintah pimpinan Mahkamah Agung menyarankan untuk semua hakim menolak semua permohonan dispensasi kawin agar masyarakat taat akan aturan dan dapat mencegah dari perkawinan di bawah umur.

Referensi

- Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni ISSN 2579-6348 (Versi Cetak) Vol. 5, No. 1. (2021). hal 300-310.
- Abdul Manan, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia.* (n.d.).
- Allen, Harrell. Policy Science and Future Research, Praeger Publisher.*, (n.d.).
- Alma, Buchari. Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung, 1998.* (n.d.).
- Al-Nawawi, I. (n.d.). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-hajjaj.* Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi.
- Al-Nawawi, I. (n.d.). *Al-Taqrīb wa al-taisir ma'rifati sunan al-basyir al-nadzir fi ushul al-Hadits.*
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), cet.4, 371.* (n.d.).
- Ann Majchrzak, Methods for Policy Research, sage Publication, Beverly.* (n.d.).
- Anselm Strauss, Juliet Corbin; Basic of Qualitative Research, Techniques.* (n.d.).
- Bappenas, Sekretaris Pengembangan Public Good Governance; Public Good.* (n.d.).
- Catherine Marhall, Gretchen B Rossman; Designing Qualitative Research.*, (n.d.).
- Champion dean, J, Basic Statistic for Sosial Research, Macmillan.* (n.d.).
- Chisnall, Peter M., Marketing Research, McGraw Hill Marketing Series.*, (n.d.).
- Conover, W. J, Practical Nonparametric Statistic, John Wiley & Son, New.* (n.d.).
- Cook Thomas D, Qualitative and Quantitative Methods Instrumen.* (n.d.).
- Emory, Business Research Methods, Richard D. Irwin Inc. 1985.* (n.d.).
- Fitria Olivia. (2015). Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Lex Jurnalica, 12(3), 202–211.* (n.d.).
- Fuad, A. M. (2016). vol 1 no 1.
- Hadiati, M. (n.d.). *Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia perkawinan.*
- Hazm, I. (n.d.). *Al-Muhalla bin Al-Atsar.*
- Hibban, M. b. (n.d.). *Shahih ibn Hibban bi Tartib Ibn Bilban.*
- Husein Al-Zahabi, M. A.-i. (n.d.). *Pakistan : Al-Maktabah Al-athriyyah.*
- Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2018), 56.* (n.d.).
- Mayadina, R. (2016). *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia . Jurnal Hukum dan Syariah.*
- Moh.Ali.Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam. Jakarta: Ahkam, 2017.* (n.d.).
- Mubarok, Achmad. Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah .* (n.d.).
- Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University .* (n.d.).
- Nugraha, Xavier, dkk. Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan .* (n.d.).
- Nurcholis, Moch Nurcholis. Penyamaan Batas Usia perkawinan .* (n.d.).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.* (n.d.).
- Rahmah, M. (2015). *Psikoedukasi tentang resiko perkawinan usia muda untuk menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja. Jurnal Intervensi Psikologi.*
- Sekaran, Uma, Metodologi Penelitian. Jakarta : Salemba Empat, 2006.* (n.d.).
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2003.* (n.d.).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus besar Bahasa .* (n.d.).
- Umam, Khairul dkk. Ushul Fiqh I. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.* (n.d.).
- Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam", JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020.* (n.d.).

- agama, k. (2009). *AL-QUR'AN*.
- 1945, U.-U. D. (n.d.). *Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945*.
- Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7*. (n.d.).
- Press, U. I. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Soekanto, s (1981) pengantar penelitian hukum cetakan ke 2*.
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>. (n.d.).
- <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>. (n.d.).
- Konstitusi, M. (2015). *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014*.
- Konstitusi, M. (2019). *salinan putusan mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*.